



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 3, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 01/09/2023
 Reviewed : 24/09/2023
 Accepted : 26/09/2023
 Published : 28/09/2023

Mardinal Tarigan¹
 Amar Khairi Ahmad²
 Anggun Sari Fadilla³
 Dwi Hartina⁴

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Abstrak

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Pendidikan masa Belanda memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat dengan tujuan westernisasi dari kristenisasi yaitu untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Pendidikan zaman Jepang disebut “Hakko Ichiu”, yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum dengan tujuan mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan, sehingga menjadi "lahan subur" tempat persemaian generasi baru. Pada masa reformasi gelombang peradaban masa depan merupakan satu kesatuan dari gelombang magma cultural dari dalam dan kekuatan globalisasi yang menerjang dari luar.

Kehidupan pesantren masa depan tidak terlepas dari kedua gelombang peradaban ini. pendidikan pesantren akan survive dan menjadi pendidikan alternatif dari masyarakat Indonesia apabila dia peka terhadap gelombang peradaban tersebut. Oleh karena itu perlu kita kaji apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari pendidikan pesantren dan madrasah.

Kata Kunci: Sejarah, Pendidikan Islam, Indonesia

Abstract

The history of Islamic education in Indonesia includes facts or events related to the growth and development of Islamic education in Indonesia, both formal and non-formal. Dutch education introduced new systems and methods but only in order to generate energy that could help their interests at a low cost than if they had to bring energy from the West with the goal of westernization from Christianization, that is, for the benefit of the West and the Christians. Japanese education is called “Hakko Ichiu”, which is to invite Indonesians to cooperate in order to achieve prosperity with Greater Asia. Through the long process of drafting from 1945-1989 Law No. 2 of 1989, in order to integrate Islamic and general education with the aim of developing Islamic education, it must have educational institutions, so that it becomes a “fertile land” where the new generation will be nurtured. At the time of reform, the wave of future civilizations is a combination of magma cultural turmoil from within and the forces of globalization that strike from the outside. The future boarding school life is not independent of these two waves of civilization. Pesantren education will survive and become an alternative education of the Indonesian people if he is sensitive to the wave of civilization. Therefore, we need to assess what are the strengths and weaknesses of boarding school and madrasah education.

Keywords: History, Islamic Education, Indonesia

¹ Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 mardinaltarigan@uinsu.ac.id

² Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 amarkhairi@gmail.com

³ Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 anggunsarifadilla@gmail.com

⁴ Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 dwihartina134@gmail.com

PENDAHULUAN

Timbulnya pembaruan pemikiran islam di Indonesia baik dalam bidang agama, sosial dan pendidikan diawali dan dilatarbelakangi oleh pembaruan pemikiran islam yang timbul di belahan dunia islam lainnya, terutama diawali oleh pembaruan pemikiran islam yang timbul di Indonesia. Latar belakang pembaruan yang timbul dimulai sejak kedatangan Napoleon.

Peristiwa ini menimbulkan kesadaran umat islam untuk mengubah diri. Kesadaran mengubah diri itulah menimbulkan fase pembaruan dalam periodisasi sejarah Islam. Fase pembaruan itu muncul sebagai sahutan terhadap tuntutan kemajuan zaman dan sekaligus juga sebagai respons umat Islam atas ketertinggalan mereka ketika itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Muncullah di dunia islam tokoh-tokoh yang berteriak agar umat islam mengubah diri guna menuju kemajuan, meninggalkan pola-pola lama menuju pola baru yang berorientasi kepada kemajuan zaman.

Latar belakang pembaruan pendidikan islam di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pembaruan yang bersumber dari ide-ide yang muncul dari luar yang dibawa oleh para tokoh atau ulama yang pulang ke tanah air setelah beberapa lama bermukim di luar negeri. Ide-ide yang mereka peroleh di perantauan itu menjadi wacana pembaruan setelah mereka kembali ke tanah air.

Kedua adalah, faktor yang bersumber dari kondisi tanah air juga banyak mempengaruhi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Kondisi tanah air Indonesia pada awal abad ke-20 adalah dikuasai kaum penjajah barat.

Dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan pendidikan diskriminatif. Lembaga pendidikan di kala itu di tanah air dibagi atas tiga strata.

Strata pertama adalah strata tertinggi yaitu sekolah untuk anak-anak Belanda ELS, HBS dan seterusnya ke perguruan tinggi. Strata kedua adalah untuk anak-anak bumiputra yang orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi dan mempunyai posisi di pemerintahan, bisa di sebut kelompok elite masyarakat Indonesia.

Berita Islam di Indonesia telah diterima sejak orang Venesia (Italia) yang bernama Marcopolo singgah di kota Perlak dan menerangkan bahwa sebagian besar penduduknya telah beragama Islam (Mansur, 2004). Sampai sekarang belum ada bukti tertulis tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia, namun banyak teori yang memperkirakannya. Pada umumnya teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur perdagangan dan pelayaran antara Dunia Arab dengan Asia Timur. Pulau Sumatra misalnya, karena letak geografisnya, sejak awal abad pertama Masehi telah menjadi tumpuan perdagangan antarbangsa dan pedagang-pedagang yang datang ke Sumatra (Alfian, 2005).

Meneliti sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari umat Islam, baik dari perjuangan melawan penjajah maupun dalam lapangan pendidikan. Melihat kenyataan betapa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai keberhasilan dengan berjuang secara tulus ikhlas mengabdikan diri untuk kepentingan agamanya disamping mengadakan perlawanan militer. Perlu diketahui bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal.

Yang dikaji melalui pendekatan metode oleh sebab itu pada setiap disiplin ilmu jelas membutuhkan pendekatan metode yang bisa memberikan motivasi dan mengaktualisasikan serta memfungsikan semua kemampuan kejiwaan yang material, naluriyah, dengan ditunjang kemampuan jasmaniah, sehingga benar-benar akan mendapatkan apa yang telah diharapkan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan melalui wawancara terstruktur terhadap beberapa tokoh penting yang ada di Medan dan studi pustaka (Literature Review). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, 2022).

Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi (Hakim, 2013).

Studi pustaka (Literature Review) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan mewawancarai kepala sekolah dan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, jurnal, riset yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik primer maupun sekunder. Pada tahap lanjut hasil wawancara dan bahan Pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dilakukan pengolahan data dan pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, yang kemudian dianalisis atau diabstraksikan secara kritis dan harus mendalam untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda

Jika dilihat kembali pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia dahulu, maka kita akan dapat lihat bersama bahwa umat Islam memiliki kontribusi dan peran yang tidak dapat terpisahkan, baik dalam perjuangan melawan penjajah maupun pendidikannya. Di Indonesia sendiri, umat Islam memiliki tingkat mayoritas penduduk di Indonesia, umat Islam juga memiliki tanggung jawab serta moral untuk membangun dan mengatur negeri. Namun, pada masa penjajahan, pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran utama di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah penjajah.

Karena kurangnya perhatian tersebut, maka para tokoh Islam merasa sangat perlu untuk bisa mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai dasar pembangunan generasi Islam. Mereka akhirnya mendirikan lembaga-lembaga yang di dalamnya dapat memberikan kesempatan bagi semua anak-anak Islam agar bisa untuk belajar agamanya sendiri melalui pengajaran-pengajaran tradisional dan ada juga yang sudah modern sebagai fondasi bagi pembangunan generasi Islam yang berkualitas.

Pemerintah Belanda mulai datang untuk menjajah Indonesia pada tahun 1619 M, dimana saat itu Jan Pieter Coen menduduki Jakarta, dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panotogomo. Pada saat pemerintahan VOC, terutama ketika Van den Bosh menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah.

Setelah datangnya Belanda ke Indonesia, pendidikan di Indonesia pun dapat dikelompokkan menjadi 2 periode, yaitu: (1) periode VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan (2) periode pemerintah Hindia Belanda (Nederlands-Indie). Pada periode VOC, pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yaitu berdasarkan dengan adanya untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. VOC tidak segan-segan untuk berperang bila ada yang menghalangi tujuan mereka. Ini bisa diperhatikan dari hak aktornya yang terdapat dalam suatu pasal yang berbunyi: "Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Hal ini menyebabkan terpecahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Di satu pihak adanya jenis pendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja. Di pihak yang lain adanya pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak mepedulikan agama. Hal ini dikenal dengan sistem dikotomi pendidikan.

Adapun politik yang diterapkan pemerintahan Belanda pada saat itu didasari oleh rasa ketakutan serta rasa kolonialismenya. Pada saat itu pemerintahan Belanda juga mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa semua pendidikan agama Islam baik yang ada di masjid-mesjid, mushallah, pondok-pondok pesantren dan lainnya tidak ada satupun yang dapat membantu Belanda. Kemudian pada saat itu Belanda juga memberikan kebijakan, yang isinya:

1. Orang yang memberikan pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin terlebih dahulu kepada mereka, ini terjadi pada tahun 1882

2. tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad, dan lain-lain
3. memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan Nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, yaitu berupa Sumpah Pemuda.

Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahn Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II. Meraka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan: "Asia Timur Raya untuk Asia." Dikarenakan penduduk Indonesia adalah beragama Islam maka Pada babak pertamanya pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Untuk mendekati umat Islam Indonesia.

Adapun Maksud dari pemerintah Jepang yang sekan menampakkan diri untuk siap membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah strategi semata dalam upaya Jepang untuk perlahan menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.

Sebelum mengetahui strategi yang di bawa oleh Jepang, rakyat Indonesia menyambut dengan hangat kedatangan Jepang ke Nusantara. Karena pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dengan iming-iming kemerdekaan dan membawa semangat kemerdekaan serta semangat pembebasan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti-Belanda. karena pada saat pemerintahan Belanda di Indonesia masyarakat khususnya umat Islam mendapatkan penindasan serta pengekangan yang luar biasa dari pemerintahan Belanda, sehingga Rakyat dikebanyakan daerah di Jawa menyambut pasukan-pasukan Jepang dengan suka cita dengan mengibarkan bendera Jepang dan Indonesia.

Kedatangan Jepang ke Indonesia dengan melucuti tentara sekutu dibarengi dengan semangat gerakan "Tiga A" yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia dan Nippon cahaya Asia. Kampanye slogan yang dimulai sejak Mei sampai Desember 1942, pelaksanaannya diserahkan kepada bangsa Indonesia sendiri, yakni Mr. Syamsudin yang dibalik itu dibarengi dengan dilarangnya semua organisasi rakyat, kemudian diganti dengan mendirikan gerakan-gerakan semisal DjawaHooko Kai (Kebaktian Rakyat Jawa), Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan lainlain

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidaklah hanya memenangkan peperangan. Secara konkret tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah menyediakan tenaga cuma-cuma (rumosha) dan prajurit-prajurit yang membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Di sisi lain pada dasarnya misi penjajahan Jepang tidaklah berbeda dengan Belanda, yaitu misi gospel, gold, and glory (penyebaran agama, kekayaan, dan kejayaan/kekuasaan). Hanya saja, karena ditolak dan didemonstrasi oleh para santri, maka usaha men-Shinto-kan masyarakat Indonesia tidak semasih Kristenisasi kaum kolonial Belanda.

Pada saat itu Tiga jenjang pendidikan inilah yang kemudian dianut dalam sistem pendidikan nasional, yakni SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA juga 3 tahun. Demikian pula terhapus sistem dikotomi dan konkordansi pendidikan antara penduduk pribumi dengan bangsa lain. Pada giliran selanjutnya, sekolah-sekolah bekas Hindia Belanda, sekolah-sekolah swasta dan sekolah Agama Islam, misalnya, sekolah-sekolah Muhammadiyah, Sekolah Taman Siswa, dan sekolah-sekolah zending yang dikelola oleh dan untuk misionaris, juga diperbolehkan beroperasi kembali.

Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Orde Lama)

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa:

Madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah. (A. Timur Djaelani 1980) Kenyataan ini timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, (A. Ridwan Saidi, 1984) yaitu :

- a. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
- b. Politik non kooperatif para ulama' terhadap Belanda yang memfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya adalah suatu bentuk penyelewengan agama.

Kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern. Seperti yang tertera dalam tujuan nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Endang Sudardja 1984)

Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama disekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul pun diterima (Muhammad Yunus 1985). Selain itu pendidikan agama disekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian. Untuk itu dibentuk Departemen Agama pada tanggal 13 Desember 1946 yang bertugas mengurus penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren. Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30 % pelajaran agama dan 70 % pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan (Musyriyah Sunanto, 2005) sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun.
4. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari

Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum. Jenjang pendidikan dalam system madrasah terdiri dari tiga jenjang. Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Kedua, Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun. Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi. (Deliar Noer, 1983). Sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup mengajarkan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum. (Karel A. Steenbrink 1994)

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. (Maksum 1999) PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Orde Baru)

Peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal:

- a. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.
- c. Pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan.
- d. Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
- e. Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.
- f. Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.

Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memiliki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Reformasi)

Pesantren dan madrasah adalah milik kebudayaan Indonesia. Dan oleh karena pendidikan adalah sebenarnya merupakan gagasan kebudayaan, maka mendidik berarti pula menggagas kebudayaan masa depan. Di sinilah letaknya arti pesantren di dalam membangun kebudayaan masa depan. Seperti Malik Fadjar mengatakan gelombang peradaban masa depan merupakan satu kesatuand ari gejala magma cultural dari dalam dan kekuatan globalisasi yang menerjang dari luar. Kehidupan pesantren masa depan tidak terlepas dari kedua gelombang peradaban ini. pendidikan pesantren akan survive dan menjadi pendidikan alternatif dari masyarakat Indonesia apabila dia peka terhadap gelombang peradaban tersebut. Oleh karena itu perlu kita kaji apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari pendidikan pesantren dan madrasah.

1. Kekuatan Pendidikan Islam : Pendidikan Yang Lahir Dari Masyarakat Dalam era reformasi dewasa ini dan sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia maka kita berbicara mengenai tuntutan hak rakyat termasuk pendidikan.
2. Kelemahan : Cenderung Kepada Ortodoksi Apabila kita teliti kekuatan dari pendidikan pesantren dan madrasah justru disitulah pula terletak kelemahannya. Dalam perjalanan sejarah, sistem pendidikan pesantren dan madrasah telah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang, maupun pada masa kemerdekaan. Kelemahannya terletak kepada keunikannya bahwa pesantren dan madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri.

SIMPULAN

Pendidikan Islam pada zaman kolonial Belanda tidak mendapat rintangan. Hal ini ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya berjalan dengan lancar walaupun terlihat abiturienya tidak bisa diterima oleh mereka dan yakin kalau kesadaran dari pihak Islam telah timbul untuk tidak bekerja pada Belanda yang telah menjadi perintang kemajuan bangsa. Kenyataan seperti ini sayang masih berlaku sampai sekarang sehingga orang-orang Islam kurang berperan dalam pemerintahan. Hal ini tentu penyebabnya adalah melemahnya kekuatan politik Islam walaupun Islam di Indonesia mencapai jumlah yang sangat banyak. Pada masa Jepang tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan rasa ke-Islaman yang benar guna kepentingan dunia dan Akhirat, dan yang kedua membelah bangsa dan tanah air untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa itu sendiri ataupun kemerdekaan secara manusiawi.

Pendidikan masa orde lama yaitu sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. Ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Mansur, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jogjakarta: Global Pustaka Utama 2004)
- Maksum. *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Mustafa dan Abdullah Ally. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Noer Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali, 1983).
- Saidi Ridwan. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. (Jakarta : Rajawali, 1984).
- Steenbrink Karel A. *Pesantren Madrasah Sekola*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994)
- Sudarja Endang, *UUD RI '45 dalam hubungannya dengan Pendidikan Moral Pancasila*. (Bandung : Ghalia Indonesia, 1984).
- Sunanto Musyirifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Teuku Ibrahim Alfian, *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*, (Ceninnets: Jogjakarta, 2005)
- Tim Penyusun Departemen Agama. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta :DEPAG RI, 1986)
- Djaelani Timur. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. (Jakarta: Dermaga, 1980)